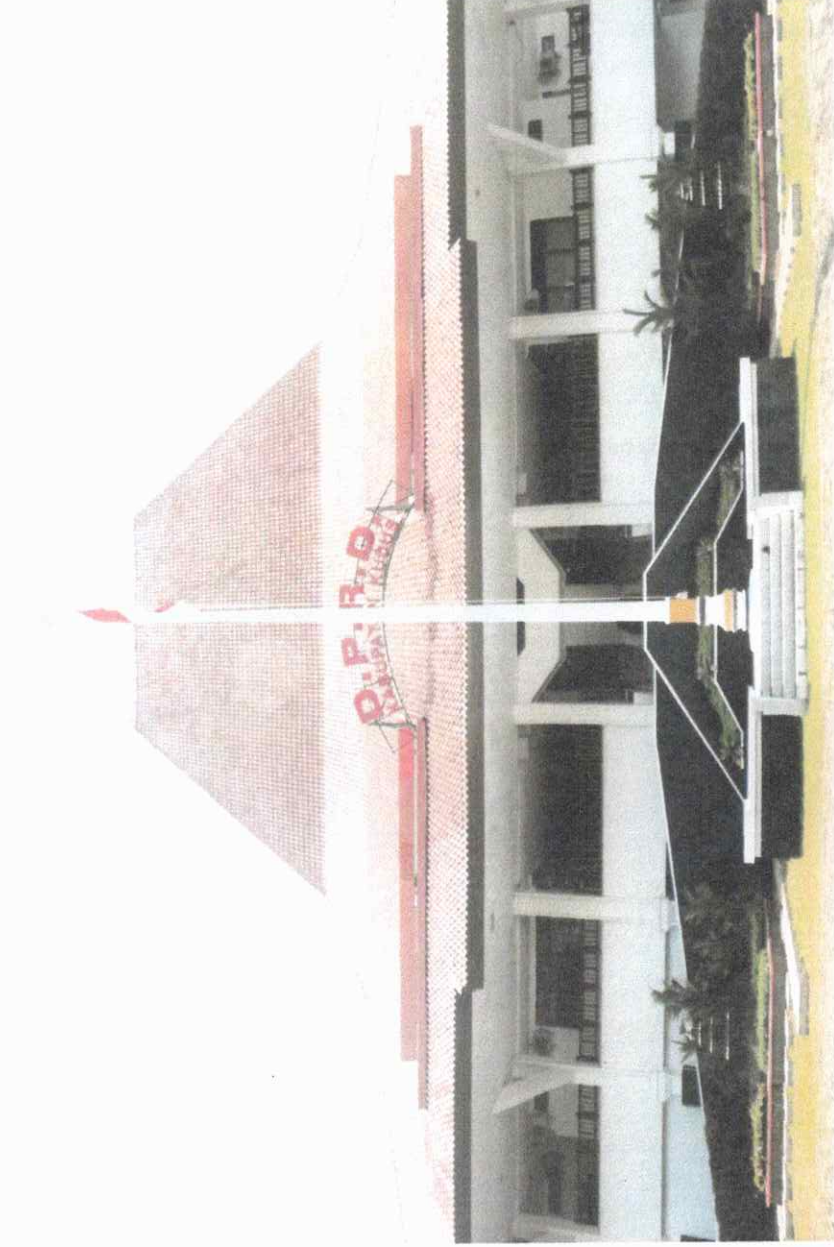


**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**



OLEH:

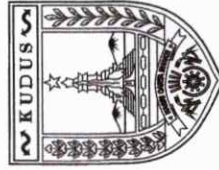
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Jl. R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

Email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.3 Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.....	10
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	10
BAB III	12
TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Telaahan Kebijakan terhadap Nasional	12
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	13
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
BAB IV	19
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V	20
PENUTUP	20
LAMPIRAN	
Tabel 2.1	
Tabel 2.2	
Tabel 2.4	
Tabel 2.5	



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan R.Agil Kusumadya Nomor 44Telp. (0291) 435111 Fax. (0291) 435594
K U D U S 59343

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 064.a /050.2.4 / 2021
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid

-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6515);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyusun Program dan Rencana Kerja Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



JADMIKO MUHARDI SETIYANTO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Kudus
 Nomor : 064.3 / 050.2.4 / 2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN KUDUS
 TAHUN 2022

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KELOMPOK KERJA
1.	Sekretaris DPRD	Ketua	Ketua
2.	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris	I. Sekretaris Bagian Umum Ketua : Kepala Bagian Umum Dan Humas Anggota : - Kepala Sub Bagian TU Dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan - Kepala Sub Bagian Humas Dan Protokol II. Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Ketua : Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan Anggota : - Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Dan Pengkajian - Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan - Kepala Sub Bagian Persidangan Dan Risalah III. Bagian Keuangan Ketua : Kepala Bagian Keuangan Anggota : - Kepala Sub Bagian Bagian Perencanaan dan Anggaran - Kepala Sub Bagaian Akuntansi dan Perbendaharaan

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUDUS



JADMIKO MUHARDI SETIYANTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2022 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2021 yang mendasarkan pada Peraturan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 yang mengamatkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategik dari masing masing SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2022 diawali dengan musyawarah antar bagian-bagian yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Dalam rangka efektif serta efisien perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, Sekretaris DPRD menindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 -2023 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193).
19. Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Rancangan Renja
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu (tahun 2020) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2022.

2. Tujuan Penyusunan Rancangan Renja

- a. Memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Guna memberikan arah pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.
- d. Untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD pada tahun lalu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target capaian program yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja. Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target capaian program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2020 seperti ditunjukkan dalam tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan adalah

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat pada Kegiatan :

- Fasilitasi Pengkajian Perundang-undangan dan Penyusunan Produk Hukum: anggaran tidak terserap maksimal yaitu sebesar 49,34% meliputi Sub kegiatan Hearing, Sub Kegiatan Reses dan Sub Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah. Tetapi target/keluaran kegiatan Fasilitasi Pengkajian Perundang-undangan melebihi dari target yang ditetapkan.

Tidak maksimalnya penyerapan anggaran ini disebabkan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Hearing

DPRD beranggapan tidak ada permasalahan yang perlu dikoordinasikan melalui public hearing

b. Sub Kegiatan Reses

Dari sisi volume 3 kali kegiatan, target kegiatan sudah tercapai.

Tetapi terkait dengan metode pelaksanaan Reses adanya Pandemi Covid 19 Anggota DPRD tidak menggunakan anggaran sewa gedung, sound sistem, dekorasi karena tidak diperbolehkan mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak.

c. Sub Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah

Adanya Pandemi Covid 19 terjadi efisiensi anggaran perjalanan dinas pada penggunaan tiket pesawat karena perjalanan menggunakan kendaraan darat.

B. Realisasi program/kegiatan pada Sekretariat DPRD yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Umum pada kegiatan :

a. Peningkatan sistem Perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja jumlah dokumen yang dikerjakan sudah sesuai target dalam Renstra Sekretariat DPRD . Tingkat ketercapaian sebesar 100%.

b. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan pada honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur capaian kinerja sebesar 100%.

c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur pada ATK, Asuransi gedung kantor, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Biaya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi, Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kantor, Jasa Surat Menyurat, Jasa Telepon, Listrik dan Air, Makanan dan Minuman Harian

Pegawai dan Tamu, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Mebeleur, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pengadaan Kendaraan, Pengadaan Mebeleur, Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dan Pengadaan Peralatan Kantor capaian kinerja 100%

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah pada kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD meliputi Fasilitasi Rapat-Rapat Paripurna dan Rapat Alat Kelengkapan sudah memenuhi target kinerja .
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD meliputi fasilitasi pelayanan kesehatan DPRD dan Rapat Koordinasi, Konsultasi, Kunjungan Kerja sudah sesuai dengan agenda Rencana Kerja DPRD.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Realisasi program/kegiatan yang berjalan pada tahun 2020 yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

- a. Fasilitasi Pengkajian Perundang-Undangan dan Penyusunan Produk Hukum capaian kinerja sebesar 150% . Dari target Pembahasan Ranperda sebanyak 12 ranperda terealisasi mencapai 18 ranperda.

2. Program Penyelenggaraan Kehumasan

- a. Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol Capaian Kinerja sebesar 202 %. Dari target kinerja sebesar 113 kali terealisasi sebesar 229 kali .

Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran dari Pokok Pokok Pikiran DPRD pada Kegiatan Publikasi di media massa.

D. Faktor – faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :
Sekretariat DPRD pada tahun 2020 semua kegiatan sudah memenuhi target capaian /keluaran.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencapai atau memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi (akibat langsung) terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Dengan adanya program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencukupi/ memenuhi target yang direncanakan maka capaian sasaran program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 juga tidak akan mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini membuat ASN Sekretariat DPRD berupaya pada tahun berikutnya bisa memenuhi target yang ditetapkan.

F. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut yaitu :
Melakukan koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD khususnya Alat Kelengkapan Dewan yang terkait terhadap kegiatan yang belum memenuhi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Di tahun 2020 target dan capaian pelayanan Sekretariat DPRD telah terpenuhi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tertuang dalam Tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Sarana prasarana, jumlah pegawai dan struktur organisasi serta jumlah anggaran yang ada merupakan solusi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus
- b. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD
- c. Hubungan koordinasi dan lingkungan kerja yang harmonis dan mantab antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
- d. Visi dan misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD melalui tujuan yang jelas dan terarah.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus.

Guna mencapai target sasaran kinerja Sekretariat DPRD diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagai gambaran perencanaan awal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), seiring dengan dinamika kebutuhan dan mengakomodir kebijakan pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan review atas rancangan awal RKPD yang tertuang dalam tabel 2.4 sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Untuk mencapai keberlanjutan yang holistik diperlukan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menekankan strategi pembangunan yang berkelanjutan yaitu *pro-growth, pro job, dan pro environment*. Hal ini dilaksanakan dengan menerapkan model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau *green economy*.

Secara umum, prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mempunyai sasaran yang akan dicapai yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus.

untuk Kebijakan ini diwujudkan melalui penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik disinkronkan dengan kebijakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi dengan diterapkan pada kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan meliputi semua kegiatan - kegiatan DPRD pada tahun berjalan.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah .

Untuk kegiatan ini diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

3.2.1 Tujuan

Mengacu pada visi Kepala Daerah Kabupaten Kudus yaitu

” *KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SE-JAHTERA*” serta misinya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing ;

Untuk Sekretariat DPRD mengacu pada misi ke dua yaitu

“ *MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK* “

Maka Tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

” Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif”

3.2.2 SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai secara nyata berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Rencana kerja berupa program, kegiatan, lokasi dan total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan perkiraan maju tahun 2022 tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021 yang tertuang dalam Tabel Rencana Program, Kegiatan Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator sebagaimana terlampir.

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan yang sebelumnya dibuat sesuai dengan rancangan awal RKPD tahun 2021, untuk selanjutnya disesuaikan dengan Permendagri No 90 tahun 2019 yang tertuang dalam Tabel Pemetaan Program dan Kegiatan sebagaimana terlampir.

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun uraian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten

Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

SUB KEGIATAN :

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KEGIATAN :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

KEGIATAN :

- 3.Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

KEGIATAN :

- 4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KEGIATAN :

- 5.Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN :

- 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KEGIATAN :

- 6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN :

- 6.1. Pengadaan Mebel
- 6.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN :

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN :

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN :

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUB KEGIATAN :

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

8.2. Pemeliharaan Mebel

8.3. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

8.4. Pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN :

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

SUB KEGIATAN :

9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

KEGIATAN :

10. Layanan Administrasi DPRD

SUB KEGIATAN :

10.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

KEGIATAN :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

SUB KEGIATAN :

- 1.1 Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 1.4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

KEGIATAN :

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

SUB KEGIATAN :

- 2.1. Pembahasan APBD

KEGIATAN :

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

SUB KEGIATAN :

- 3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

KEGIATAN :

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

SUB KEGIATAN :

- 4.1. Bimbingan Teknis DPRD
- 4.2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 4.3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 4.4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

KEGIATAN :

5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat

SUB KEGIATAN :

- 5.1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 5.2. Pelaksanaan Reses

KEGIATAN :

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

SUB KEGIATAN :

6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD

KEGIATAN :

7. Fasilitasi Tugas DPRD

SUB KEGIATAN :

7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

7.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

7.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kudus 2018 – 2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah . Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

a.Faktor- Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah RPJMD Kabupaten Kudus, Renstra Sekretariat DPRD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

b.Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terdiri dari 10 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

c.Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagaimana lampiran tabel 2.5

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2022 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2022 akan dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan, dan juga sebagai acuan kegiatan dan indikator pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus sebagai bagian dari instansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tahun 2022 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Disamping hal tersebut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Kudus, 2021

SEKRETARIS DPRD



Drs. JADMiko MUHARDI SETIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19691005 199001 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

2.1	Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	- Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD	273 Kali	685.05	242	5.36.255	214 Kali	537.195	37	58.908	70	77.585	113	119.355	148	130.99	148	396.838	69,16	72,01	148	923.063	44,85	134,75
2.2	Peningkatan kapasitas DPRD	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	60 Kali	10.854.277	82	14.409.042	169 Kali	29.150.775	48	5.998.963	33	1.380.193	79	5.486.473	40	8.539.403	200	21.405.033	118,34	73,43	282	35.814.075	207,35	329,95
2.3	Fasilitasi pengkajian undang-undang dan penyusunan produk hukum	- Terlaksananya Fasilitasi Pengkajian Perundang-undangan dan Penyusunan Produk Hukum	12 Perda	1.546.684	7	1.229.414	12 Perda	6.183.232	-	1.245.075	-	389.149	1	297.98	17	1.118.999	18	3.050.603	150	49,34	25	4.280.017	208,33	276,72
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
3	Program penyelenggaraan kehumasan	persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan		607.969		0		1.342.037	0	0	0	0	25,24	338.764	70,85	950.785	96,09	1.289.549	112,5	Sangat Tinggi	Sedang			
3.1	Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol	- Terlaksananya Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol	100 Eksp 120 Kali	607.969	139	1.041.741	113 Kali	1.342.037	24	98.832	40	145.132	45	94.801	120	950.785	229	1.289.549	202,65	96,09	368	2.331.290	306,67	383,46
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Rata - rata capaian kinerja SKPD (%)																								
Predikat Kinerja																								

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Koordinasi dan kerjasama yang baik serta dukungan SDM dan sarpras yang ada untuk melaksanakan program dan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Dinamianya kegiatan di DPRD sehingga yang sudah terencana kadang tertunda

Tindak lanjut yang diperlukan dalam twujudan berikutnya :

Lebih meningkatkan capaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan program dan kegiatan

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kudus	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,5	41.222.751.058	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	83,5	42.237.773.799	
4.02.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai kebutuhan	26 dok	15.000.000	Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai kebutuhan	26 dok	12.977.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah dokumen Renstra, Renja, DPA, DPPA, RKPD, evaluasi renja yang tersusun	19 dokumen	10.948.000	Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan Perangkat daerah sesuai aturan	19 dokumen	10.588.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	4.052.000	Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standart	7 dokumen	2.389.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah dokumen pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	52 dokumen	5.188.739.000	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standart	87 dokumen	5.188.739.000	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kudus	Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	40 dokumen	5.751.521.058	Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	75 dokumen	5.183.504.000	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kab.Kudus	Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standart	12 dokumen	3.000.000	Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standart	12 dokumen	5.235.000	
4.02.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah asset kantor yang terbayar	2 unit	141.000.000	Jumlah asset kantor (sewa tanah dan asuransi gedung) yang terbayar	2 unit	151.000.000	
4.02.01.2.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Kudus	Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2 unit	141.000.000	Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2 unit	151.000.000	
4.02.01.2.02.03.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	57 orang	423.384.000	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	160 org/kali	291.150.000	
4.02.01.2.02.03.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kudus	Jumlah ASN yang meningkatkan kinerja aparatur	34 org	178.849.000	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai kinerja aparatur	68 org/kali	144.500.000	

4.02.01.2.02.03.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kudus	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 org	244.535.000	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 org/kali	146.650.000
4.02.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kudus	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 sub kegiatan	1.161.529.000	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	365 jenis/ok	1.089.403.300
4.02.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab.Kudus	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	3 jenis	24.399.000	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 jenis	24.399.000
4.02.01.2.02.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Kudus	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, peralatan dan perlengkapan yang tersedia	80 jenis	246.711.000	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	80 jenis	213.025.000
4.02.01.2.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kudus	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis	73.290.000	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	9 jenis	58.165.000
4.02.01.2.02.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Kab.Kudus	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	8 jenis	474.819.000	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	8 jenis	442.882.000
4.02.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kudus	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	34.750.000	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	24 jenis/bulan	34.748.300
4.02.01.2.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Kudus	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	48.960.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 jenis	53.400.000
4.02.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kudus	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas	30 kali	258.600.000	Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	220 org/kali	262.784.000
4.02.01.2.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kudus	Jumlah Pengadaan sarpras Kantor	2 unit	730.000.000	Jumlah Pengadaan sarpras Kantor	10 unit	97.192.600
4.02.01.2.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kudus	Jumlah Pengadaan sepeda motor/operasional yang disediakan	1 unit	30.000.000	Jumlah Pengadaan sepeda motor/operasional yang disediakan	0	0
4.02.01.2.02.07.02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kudus	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 unit	700.000.000	Jumlah rehab/pembangunan Gedung Kantor	1 unit	55.200.000
			Jumlah Pengadaan Mebeleur kantor	5 unit		Jumlah Pengadaan Mebeleur kantor	5 unit	29.376.000
			Jumlah Pengadaan Sarpras Kantor	4 unit		Jumlah Pengadaan Sarpras Kantor	4 unit	12.616.600
4.02.01.2.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kudus	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 sub kegiatan	881.861.400	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672 jenis/org/bulan	1.899.217.699
4.02.01.2.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Kudus	Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat	2 jenis	13.000.000	Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat	24 jenis/bulan	13.100.000
4.02.01.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab.Kudus	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	363.119.400	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 jenis /bulan	364.668.699

4.02.01.2.02.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kab.Kudus	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	7 kegiatan	505.742.000	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	600 org/bulan	1.521.449.000
4.02.01.2.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kudus	Jumlah asset kantor yang terpelihara	91 unit	998.226.000	Jumlah asset kantor yang terpelihara	61 unit	1.579.422.200
4.02.01.2.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kudus	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	40 unit	442.241.000	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/operasional) yang terpelihara	20 unit	432.410.000
4.02.01.2.02.09.05	Pemeliharaan Mebeleur	Kab.Kudus	Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	30 unit	37.016.000	Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	5 unit	18.116.000
4.02.01.2.02.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kab.Kudus	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	3 unit	492.669.600	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	3 unit	1.022.766.200
4.02.01.2.02.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Kudus	Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	18 jenis	26.300.000	Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	18 jenis	106.130.000
4.02.01.2.02.15	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitas layanan keuangan	3 sub kegiatan	30.786.284.000	Jumlah Fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	726 org/bulan /stel	31.292.241.000
4.02.01.2.02.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab.Kudus	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	45 org	30.291.904.000	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	540 org/bulan	30.756.952.000
4.02.01.2.02.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab.Kudus	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	229 stel	358.538.000	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	141 stel	410.380.000
4.02.01.2.02.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab.Kudus	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 org	135.842.000	Jumlah anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 org	124.909.000
4.02.01.2.02.16	Layanan Administrasi DPRD	Kab.Kudus	Jumlah fasilitas layanan administrasi DPRD	167 kali	330.945.000	Jumlah fasilitas layanan administrasi DPRD	194 kali	636.431.000
4.02.01.2.02.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Rapat yang terfasilitasi	167 kali	330.945.000	Jumlah Rapat yang terfasilitasi	194 kali	636.431.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kab.Kudus	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi		13.159.181.000	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	8.460.141.000

4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD	15 kali	2.993.606.000	Jumlah fasilitasi kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD, penyusunan NA	847 ok/dok.	1.802.058.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas Bapemperda dalam/luar Propinsi	4 kali	306.900.000	Jumlah fasilitasi tugas Bapemperda dalam/luar Propinsi	126 org/kali	220.822.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas panitia khusus dalam/luar Propinsi	4 kali	1.776.802.000	Jumlah Fasilitasi tugas panitia khusus dalam/luar Propinsi	371 org/kali	827.240.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi kegiatan kajian rancangan /produk hukum /KUA PPAS	3 kali	809.924.000	Jumlah fasilitasi kegiatan kajian rancangan /produk hukum /KUA PPAS	348 org/kali	653.996.000
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	4 dokumen	99.980.000	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2 dok	100.000.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	4 kali	599.302.500	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	216 org/kali	485.636.000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	4 kali	599.302.500	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	216 org/kali	485.636.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	52 kali	2.781.942.500	Jumlah Fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	483 org/kali	954.190.000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas komisi A dalam/luar Propinsi	13 kali	695.485.625	Jumlah fasilitasi tugas komisi A dalam/luar Propinsi	102 org/kali	202.744.000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas komisi C dalam/luar Propinsi	13 kali	695.485.625	Jumlah fasilitasi tugas komisi C dalam/luar Propinsi	133 org/kali	268.889.000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar Propinsi	13 kali	695.485.625	Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar Propinsi	126 org/kali	249.457.000
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar Propinsi	13 kali	695.485.625	Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar Propinsi	119 org/kali	233.100.000
4.02.02.2.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	144 kali	2.205.188.000	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	716 org/kali	2.620.087.000
4.02.02.2.02.02	Bimbingan Teknis DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Bimtek DPRD	4 kali	647.820.000	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Bimtek DPRD	348 org/kali	645.396.000
4.02.02.2.02.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi kegiatan DPRD yang dipublikasikan	122 kali	611.368.000	Jumlah Fasilitasi kegiatan DPRD yang dipublikasikan	200 kali	1.420.741.000

4.02.02.2.02.04	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	8 kali	598.000.000	Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	72 org/hari	205.950.000
4.02.02.2.02.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab.Kudus	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	8 orang	348.000.000	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	96 org/bulan	348.000.000
4.02.02.2.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat	12 kali	732.057.000	Jumlah fasilitasi kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat	112 org/kali	401.415.000
4.02.02.2.02.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dalam daerah	10 kali	63.720.000	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD dalam daerah	67 org/kali	10.050.000
4.02.02.2.02.05.03	Pelaksanaan Reses	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi kegiatan Reses	2 kali	668.337.000	Jumlah fasilitasi kegiatan Reses	45 org/kali	391.365.000
4.02.02.2.02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas badan Kehormatan	4 kali	192.195.000	Jumlah Fasilitasi tugas badan Kehormatan	54 org/kali	106.028.000
4.02.02.2.02.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar Provinsi	4 kali	192.195.000	Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar Provinsi	54 org/kali	106.028.000
4.02.02.2.02.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas DPRD	90 kali	3.654.890.000	Jumlah Fasilitasi tugas DPRD	935 org/kali	2.090.727.000
4.02.02.2.02.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas koordinasi konsultasi alat kelengkapan	19 kali	1.475.122.000	Jumlah Fasilitasi tugas koordinasi konsultasi alat kelengkapan	493 org/kali	970.816.000
4.02.02.2.02.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab.Kudus	Jumlah fasilitasi tugas Banmus dalam/luar Provinsi	4 kali	588.785.000	Jumlah fasilitasi tugas Banmus dalam/luar Provinsi	222 org/kali	496.366.000
4.02.02.2.02.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab.Kudus	Jumlah Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	67 kali	1.590.983.000	Jumlah Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	220 org/kali	623.545.000
	JUMLAH				54.381.932.058			50.697.914.799

4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	24 jenis/bulan	36 jenis/OK	34.748,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	34.748,300
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terlaksananya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	12 jenis	365 jenis/OK	53.400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	53.400,000
4	02	01	2.06	09	Pengembangan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	Terlaksananya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	220 Orang/kali	365 jenis/OK	262.784,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	262.784,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							97.192,600				97.192,600	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pengadaan kendaraan mobil dinas jabatan	Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor	Kab. Kutai, Semesta, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	4 unit	10 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	0
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pengadaan sepeda motor/operasional yang disediakan	Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	1 unit	10 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	0
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pengadaan Mebleur Kantor	Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	5 unit	10 Unit	29.376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	29.376,000
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah rehab/pembangunan gedung kantor	Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	1 unit	10 Unit	55.200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	55.200,000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pengadaan sarpras kantor	Terselenggaranya pengadaan sarpras kantor	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	4 unit	10 Unit	12.616,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	12.616,600
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.899.217,699				1.899.217,699	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	24 jenis/bulan	672 Jenis/Orang/bulan	13.100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	13.100,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	48 jenis/bulan	672 Jenis/Orang/bulan	364.668,699	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	364.668,699
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Nelayan Umum Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	600 orang/bulan	672 Jenis/Orang/bulan	1.521.449,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	1.521.449,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.579.422,200				1.579.422,200	
4	02	01	2.09	01	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/jabatan) yang terpelihara	Terpeliharanya aset kantor dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	4 unit	61 Unit	0		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	0
4	02	01	2.09	02	Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, mobil sarpras kantor (kendaraan dinas/opsional) yang terpelihara	Terpeliharanya aset kantor dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	20 unit	61 Unit	432.410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	432.410,000
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah pengadaan Mebleur Kantor	Terpeliharanya aset kantor dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	5 unit	61 Unit	18.116,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	18.116,600
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	Terpeliharanya aset kantor dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semesta	83,5 Indeks	3 unit	61 Unit	1.022.766,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	1.022.766,200

4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemasaran Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	Terpeliharanya aset kantor dengan baik	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	83,5 Indeks	18 jenis	61 Unit	106,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	106,130,000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							31,292,241,000				31,292,241,000	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah anggaran DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	Teraksennanya fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	83,5 Indeks	540 orang/bulan	726 orang/bulan/et	30,756,952,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	30,756,952,000
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut DPRD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jenis dan jumlah pakan dinas beserta atribut yang disediakan	Teraksennanya fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	83,5 Indeks	141 stel	726 orang/bulan/et	410,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	410,380,000
4	02	01	2.15	03	Peiksaan Medical Check Up DPRD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	Teraksennanya fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	83,5 Indeks	45 orang	726 orang/bulan/et	124,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	124,909,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							636,431,000				636,431,000	
4	02	01	2.16	03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	Jumlah rapat DPRD yang terfasilitasi	Teraksennanya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	83,5 Indeks	194 kali	194 kali	636,431,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Set DPRD)	83,5 Indeks	636,431,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							8,460,141,000				13,770,549,000	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							1,802,058,000				2,993,606,000	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	Jumlah fasilitas tugas Bapempera dalam/luar provinsi	Teraksennanya fasilitas kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Penyusunan NA	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	100 persen	126 orang/kali	847 OK/dokumen	220,822,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	306,900,000
4	02	02	2.01	02	Revisi dan Pembahasan Peraturan Daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	Jumlah fasilitas tugas Panitia Khusus dalam/luar provinsi	Teraksennanya fasilitas kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Penyusunan NA	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	100 persen	371 orang/kali	847 OK/dokumen	827,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	1,776,802,000
4	02	02	2.01	03	Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	Jumlah fasilitas kegiatan kajian Rancangan/Produk Hukum/KUA PPAJ	Teraksennanya fasilitas kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Penyusunan NA	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	100 persen	348 orang/kali	847 OK/dokumen	653,996,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	809,924,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/eterangan dan/atau Naskah Akademik	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	Jumlah fasilitas penyusunan Naskah Akademik	Teraksennanya fasilitas kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, Penyusunan NA	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	100 persen	2 dokumen	847 OK/dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	99,980,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							485,636,000				599,302,500	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	Jumlah fasilitas tugas Badan Anggaran dalam/luar provinsi	Teraksennanya fasilitas tugas Badan Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	100 persen	216 orang/kali	216 orang/kali	485,636,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	599,302,500
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							954,190,000				3,181,942,500	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	Jumlah fasilitas tugas Komisi A dalam/luar provinsi	Teraksennanya fasilitas pengawasan Pemerintahan yang diakukan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semumas Kelurahan	100 persen	102 orang/kali	483 orang/kali	202,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase agenda kerja DPRD yang terrealisasi	100 persen	795,485,625

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022			Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tugas Komisaris C dalam/luar provinsi	Terlaksananya fasilitas pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	100 persen	133 orang/kali	483 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	795,485,625
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tugas Komisaris D dalam/luar provinsi	Terlaksananya fasilitas pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	100 persen	126 orang/kali	483 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	795,485,625
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tugas Komisaris B dalam/luar provinsi	Terlaksananya fasilitas pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	100 persen	119 orang/kali	483 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	795,485,625
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					2,620,087,000				2,305,188,000
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas kegiatan bimbingan teknis DPRD	Terlaksananya fasilitas kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 persen	348 orang/kali	716 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	747,820,000
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Terlaksananya fasilitas kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 persen	200 kali	716 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	611,368,000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	Terlaksananya fasilitas kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 persen	72 orang/hari	716 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	598,000,000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tenaga ahli fraksi yang tersedia	Terlaksananya fasilitas kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 persen	96 orang/bulan	716 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	348,000,000
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					401,415,000				842,905,000
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas kegiatan DPRD dalam Daerah	Terlaksananya fasilitas kegiatan peny erapan aspirasi masyarakat	100 persen	67 orang/kali	112 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	65,720,000
4 02 02 2.05 03	Peleaksanaan Reses	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas kegiatan reses	Terlaksananya fasilitas kegiatan peny erapan aspirasi masyarakat	100 persen	45 orang/kali	112 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	779,185,000
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					106,028,000				192,715,000
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tugas Badan Kehormatan dalam/luar provinsi	Terlaksananya fasilitas tugas Badan Kehormatan	100 persen	54 orang/kali	54 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	192,715,000
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					2,090,727,000				3,654,890,000
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tugas koordinasi/konsultasi alat kelengkapan DPRD	Terlaksananya fasilitas tugas DPRD	100 persen	493 orang/kali	935 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	1,475,122,000
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas tugas Badan Musyawarah dalam/luar provinsi	Terlaksananya fasilitas tugas DPRD	100 persen	222 orang/kali	935 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	588,785,000
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	Jumlah fasilitas Penyusunan matak, fasilitas tugas koordinasi/konsultasi	Terlaksananya fasilitas tugas DPRD	100 persen	220 orang/kali	935 orang/kali	persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100 persen	1,590,983,000